

**ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA TERHADAP
PELAKSANAAN KOORDINASI RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN
BENER MERIAH TAHUN 2017**

SKRIPSI

Oleh:

SETIADI MIRANDA

NPM : 14-851-0008



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA
TERHADAP PELAKSANAAN KOORDINASI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN 2017

NAMA : SETIADI MIRANDA

NPM : 14.851.0008

PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


Menyetujui,

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


(Drs. H. Irwan Nasution, S.Pd, M.AP)


(Armansyah Matondang, S.Sos M.Si)

Dekan

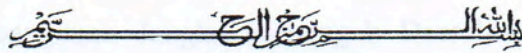



(Dr. Heri Kusmanto, MA)

Tanggal Lulus :

26-09-2018

LEMBAR PERNYATAAN



Dengan ini saya Setiadi Miranda NPM : 14-851-0008 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan atau plagiat atau menjiplak atau menganbil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau yang diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu di dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi sesuai hukum berupa :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 24 November 2018



SETIADI MIRANDA

ABSTRAK

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017 yang disusun oleh BAPPEDA kabupaten Bener Meriah memiliki sasaran, strategi, dan arah kebijakan masing-masing agar tujuan pembangunan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Bener Meriah dapat terwujud, tetapi pada pelaksanaannya juga masih terdapat kendala, sehingga target dan sasaran RPJMD tidak terlaksana dengan maksimal. Oleh sebab itu, penulis tertarik meneliti tentang Tugas Dan Fungsi Bappeda Terhadap Pelaksanaan Koordinasi RPJMD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 serta Faktor-faktor Apa yang Menghambat Pelaksanaan Koordinasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 yang telah dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan dengan jenis pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif sebagai metode analisis data. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, angket dokumentasi dan observasi. Berdasarkan analisis Pelaksanaan pengkoordinasian pembangunan daerah yang dilaksanakan BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan tupoksinya melalui rapat koordinasi antar bidang dan SKPD, *Forum Group Discussion (FGD)*, serta melalui musrenbang tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional masih terdapat kendala. Kendala yang dihadapi yaitu seringnya keterlambatan dalam hal pengumpulan rencana kerja SKPK dan data pendukung lainnya yang mengakibatkan BAPPEDA dalam berkoordinasi mengalami kesulitan pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Kata Kunci : BAPPEDA, Koordinasi, RPJM

ABSTRACT

The 2012-2017 Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) prepared by the BAPPEDA of Bener Meriah District has its own goals, strategies and policy directions so that the development goals to achieve the vision and mission of Bener Meriah District can be realized, but there are still obstacles to implementation. so that the RPJMD targets and targets are not implemented optimally. Therefore, the authors are interested in examining the Task and Function of the Bappeda on the Implementation of the 2017 Bener Meriah District RPJMD Coordination and the Factors that Inhibit the Implementation of the Coordination of 2017 Bener Meriah District Medium Term Development Plans (RPJMD) that have been implemented. The research method used with this type of qualitative research approach is descriptive as a method of data analysis. Data collection techniques used by the authors in this study are interview techniques, documentation and observation questionnaires. Based on the analysis, the implementation of regional development coordination carried out by BAPPEDA of Bener Meriah District in accordance with its main tasks and functions through inter-sector coordination meetings and SKPD, Forum Group Discussion (FGD), as well as through village, subdistrict, district, provincial and national musrenbang there are still obstacles. Constraints faced were frequent delays in the collection of SKPK work plans and other supporting data which resulted in BAPPEDA in coordinating difficulties in implementing development planning.

Keywords: BAPPEDA, Coordination, RPJM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Setiadi Miranda
Tempat/tgl.lahir : Banda Aceh, 29 September 1995
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama/Bangsa : Islam/Indonesia
Alamat : Paya Gajah Kec. Bukit Kab. Bener Meriah
Anak ke : 1 (Pertama) dari 3 (tiga) Bersaudara.
Nama Orang Tua
Ayah : Misdal, S.Pd
Ibu : Nurmala
Alamat : Paya Gajah Kec. Bukit Kab. Bener Meriah

Riwayat Pendidikan

1. Tamat MIN 1 SP. 3 Kabupaten Bener Meriah Tahun 2007, Berijazah.
2. Tamat MTSN SP. 3 Kabupaten Bener Meriah Tahun 2010, Berijazah.
3. Tamat MAS BINAAN Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013, Berijazah.
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Medan Area 2014 sampai sekarang.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Penulis

SETIADI MIRANDA

KATA PENGANTAR

Maha suci Allah SWT yang menganugerahkan setiap orang yang menjalani hidup di dunia ini yang berbeda-beda. Maha indah karunia-Nya yang telah membekali masing-masing orang dengan potensi yang beraneka rupa. Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas karunia, hidayah dan anugerahnya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA TERHADAP PELAKSANAAN KOORDINASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2017”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Medan Area .

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ayahanda Misdal, S.Pd dan ibunda Nurmala selaku orang tua yang mana telah mencurahkan seluruh keringat dan air mata serta membimbing kami, memanjatkan do`a untuk kami, anak-anakmu. Kalianlah seluruh nafas kami, inilah persembahanku untuk kalian Ayah, Ibu. Penulis juga banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dari berbagai pihak. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Kepada Bapak Prof.Dr. Dadan Ramdan, M,Eng, M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Bapak Yurial Arief Lubis, S.Sos, M,IP selaku ketua program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

4. Bapak Drs. H. Irwan Nasution, S.Pd, M.AP selaku dosen pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Armansyah Matondang, S.Sos M.IP. selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak memberikan saran demi penyempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Evi Kurniaty S.Sos, M.IP .selaku sekretaris, yang telah banyak memberikan saran dan tanggapan dalam skripsi ini..
7. Dosen dan seluruh pegawai staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh pegawai staff biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
9. Bapak Khairun Aksa selaku kepala BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah yang telah memberikan kesempatan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasinya.
10. Bapak Fahmi, ST selaku Plt Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bener Meriah yang sudah memberikan waktu dan informasinya kepada penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.
11. Bapak Iwan Lukman Nul Hakim yang telah memberikan kesempatan waktu serta informasinya kepada penulis.
12. Masyarakat yang menjadi narasumber yang disertakan dalam penelitian ini

13. Kepada seluruh teman-teman di Jurusan Ilmu pemerintahan stambuk 2014 yang sudah memberikan semangat dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Serta teman-teman seperantauan terutama Ela yang selalu memberikan ku semangat dan doa, Andi, Tien, Andika Yuni, Taqwa, Wen SP, Novri, Prana, Iwan Tbox yang turut serta membantu penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, semoga kalian cepat mendapatkan tujuan kalian juga.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, Juli 2018

Penulis

SETIADI MIRANDA

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
RIWAYAT HIDUP.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Penelitian.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Analisis	7
2.2 Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	9
2.3 Koordinasi.....	11
2.3.1 Tipe-Tipe Koordinasi.....	12
2.3.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Koordinasi.....	14
2.3.3 Tujuan Koordinasi	17
2.4 Perencanaan Pembangunan	18
2.4.1 Tujuan dan Fungsi Perencanaan Pembangunan	19
2.4.2 Jenis Perencanaan Pembangunan	19
2.4.3 Tahapan Perencanaan Pembangunan.....	20
2.5 Study Kasus Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bener Meriah 2012-2017.....	22
2.6 Landasan Hukum	30
2.7 Kerangka Pemikiran	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian	34
3.1.1 Jenis Penelitian	34
3.1.2 Sifat Penelitian	34
3.1.3 Lokasi Penelitian	34
3.1.4 Waktu Penelitian.....	35
3.2 Informan Penelitian	36
3.3 Tehnik Pengumpulan Data	36
3.4 Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Letak dan Lokasi Penelitian	40
4.2 Sejarah Singkat BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah	41
4.3 Tugas, Fungsi BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah	42
4.4 Struktur Organisasi	43
4.5 Analisis Hasil Penelitian	44
4.6 Pembahasan	47
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	 57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	58
 DAFTAR PUSTAKA	 59



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Sasaran, Program Pembangunan, Indikator Kerja, Capaian Kinerja dan SKPK yang bertanggung Jawab Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Yang Berkualitas Dan Sejahtera Dilandaskan Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Allah SWT.....	50
Tabel 4.2 Sasaran, Program Pembangunan, Indikator Kerja, Capaian Kinerja dan SKPK yang bertanggung Jawab Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih	50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena lembaga inilah yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. BAPPEDA adalah badan langsung yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan merupakan organisasi perangkat daerah, dan keberadaannya sebagai unsur penunjang pemerintah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Menurut Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah menyebutkan bahwa tugas pokok Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah adalah merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku. Selanjutnya, tugas pokok tersebut dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) fungsi, yaitu: 1) penyusunan rencana pembangunan daerah; 2) koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah; 3) pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah; 4) penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

daerah yang dilaksanakan bersama-sama dengan DPKKD; 5) koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber – sumber pembiayaan lainnya, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait; 6) koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPPEDA; 7) fasilitasi dan pembinaan kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah; 8) penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati; serta 9) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

Mengacu pada landasan di atas, pelaksanaan tugas BAPPEDA mengerucut menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai (1) pengambil kebijakan/keputusan (*policy maker*), (2) koordinator, (3) *think-tank*, dan (4) administrator . Keempat peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis. Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, BAPPEDA menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan daerah baik Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Untuk rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang bersifat tahunan, disusun berikut perkiraan anggarannya.

Penyusunan RKPD oleh BAPPEDA diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat

untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah. Pencapaian target-target pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi pencapaian target kinerja tahun sebelumnya serta penetapan anggaran untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan.

Program BAPPEDA sejak Tahun 2012-2017 adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah, mengacu kepada visi dan misi Kabupaten Bener Meriah yaitu Terwujudnya Bener Meriah menjadi Kabupaten Madani, dengan misi pembangunan jangka menengah sebagai berikut :

Misi 1: Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera dilandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Misi 3 : Mengembangkan tata kelola pertanian yang terpadu

Misi 4 : Mengembangkan aktivitas sektor agroindustri

Misi 5 : Meningkatkan akses dan jaringan perdagangan global

Misi 6: Mengembangkan kemandirian dan usaha pemanfaatan sumber daya energi

Misi 7: Mengembangkan pemeliharaan dan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang direncanakan dan telah dilaksanakan memiliki sasaran, strategi, dan arah kebijakan masing-masing agar tujuan pembangunan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Bener Meriah dapat terwujud, tetapi pada pelaksanaannya juga masih terdapat kendala, sehingga target dan sasaran RPJMD tidak terlaksana dengan maksimal.

RPJMD Kabupaten Bener Meriah 2012-2017 telah dilaksanakan dan telah dievaluasi oleh BAPPEDA sebagai salah satu tugas dan fungsinya. Tetapi pada dasarnya BAPPEDA memiliki fungsi lain yaitu berkoordinasi dengan SKPK lain dalam pelaksanaan RPJMD yang telah disusun.

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tugas Dan Fungsi Bappeda Terhadap Pelaksanaan Koordinasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 serta Faktor-faktor Apa yang Menghambat Pelaksanaan Koordinasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang fokus penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui Tugas Dan Fungsi Bappeda Terhadap Pelaksanaan Koordinasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017
2. Mencari Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Koordinasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Tugas Dan Fungsi Bappeda Terhadap Pelaksanaan Koordinasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017
2. Faktor-faktor Apa yang Menghambat Pelaksanaan Koordinasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dengan menggunakan metode ilmiah untuk menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan. Oleh karena itu yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tugas dan fungsi BAPPEDA terhadap pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam perkembangan perkembangan ilmu pengetahuan sosial dimasa mendatang terutama dalam Ilmu Sosial dan Politik
2. Secara praktis, sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuatan kebijakan (Pemerintah) maupun pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Analisis

Teori analisis menurut para ahli memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam menciptakan suatu penemuan atau solusi akan sebuah permasalahan. Peran analisis juga ditujukan untuk melakukan deteksi apabila terdapat suatu kejanggalan atau penemuan khusus dalam suatu penelitian. Melalui analisis data, langkah penyelesaian suatu masalah dapat diketahui.

Teori analisis merupakan uraian atas sebuah pokok permasalahan sesuai dengan penelitian atau hasil observasi yang telah dilakukan. Menurut Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty menganalisis merupakan : “Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”. Dengan demikian, berdasarkan ciri-ciri tersebut, pengertian analisis adalah sebagai suatu tindakan untuk menjawab permasalahan berdasarkan observasi, pengolahan data, dan akhirnya penarikan kesimpulan, sehingga penyelesaian dari permasalahan tersebut dapat diketahui dengan tepat.

Dalam penelitian kualitatif proses analisis dan interpretasi data memerlukan cara berpikir kreatif, kritis dan sangat hati-hati. Kedua proses tersebut merupakan proses yang saling terkait dan sangat erat hubungannya. Analisis data merupakan proses untuk pengorganisasian data dalam rangka mendapatkan pola-pola atau bentuk-bentuk keteraturan. Sedangkan interpretasi data adalah proses pemberian makna terhadap pola-pola atau keteraturan-keteraturan yang ditemukan dalam sebuah penelitian. Data yang terkumpul

diharapkan dapat merupakan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Proses penyusunan data dapat berbeda-beda antar peneliti tergantung selera, pengalaman, dan kreatifitas berfikir sehingga data yang terkumpul dapat mempengaruhi pemilihan analisis data.

Dalam penelitian kualitatif tidak ada formula yang pasti untuk menganalisis data seperti formula yang dipakai dalam penelitian kuantitatif. Namun, pada dasarnya terdapat beberapa kesamaan langkah yang ditempuh untuk menganalisis dan interpretasi data. Proses analisis data diawali dengan menelaah seluruh data yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan lapangan, dan kajian dokumen (pustaka). Langkah berikutnya reduksi data yang dilakukan dengan cara abstraksi. Abstraksi merupakan upaya membuat rangkuman dari segala data yang ada. Kemudian, menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan ini dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Pengkategorian ini dilakukan dengan cara koding. Langkah terakhir, penafsiran data yang telah diuji (verifikasi) untuk dijadikan beberapa metode tertentu.

Sebagai suatu komponen dalam menyelesaikan suatu permasalahan, analisis memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Untuk mengidentifikasi ciri-ciri permasalahan yang dihadapi, sehingga nantinya dapat diketahui langkah-langkah penyelesaiannya secara tepat dan sesuai.
- b. Untuk memberikan spesifikasi atau keterangan terperinci mengenai objek permasalahan yang dianalisis.
- c. Memberikan gambaran dasar mengenai simpulan dan strategi yang akan dilakukan.

Secara umum, proses analisis berfungsi sebagai media menemukan alternatif atau gambaran dasar penyelesaian atas masalah yang diteliti. Selain itu, penguraian data atau keterangan di dalam tindakan analisis harus dilakukan secara

teliti dan hati-hati karena hasil analisis akan sangat mempengaruhi kesimpulan dan solusi atas masalah tersebut. Jadi, ulasan teori analisis dapat disimpulkan sebagai dasar atas perancangan suatu sistem yang dilakukan dengan cara sistematis, teliti, dan objektif.

2.2 Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan badan yang dibentuk oleh kepala daerah yang tugas dan fungsinya membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Menurut Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah menyebutkan bahwa tugas pokok Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bener Meriah adalah merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, tugas pokok tersebut dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) fungsi, yaitu:

1. Penyusunan rencana pembangunan daerah;
2. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. Pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilaksanakan bersama-sama dengan DPKKD;
5. Koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber -sumber pembiayaan lainnya, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
6. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPPEDA;

7. Fasilitasi dan pembinaan kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
8. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada bupati; serta
9. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

Mengacu pada landasan di atas, pelaksanaan tugas BAPPEDA mengerucut menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai

1. Pengambil Kebijakan/Keputusan (*Policy Maker*),
2. Koordinator,
3. *Think-Tank*, Dan
4. Administrator .

Keempat peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis. Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, BAPPEDA menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD). Untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang bersifat tahunan, disusun berikut perkiraan anggarannya.

2.3 Koordinasi

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai. “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan,

mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”. (Hasibuan, 2006:85)

Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2006 : 85) berpendapat bahwa : koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Koordinasi menurut Terry meliputi :

1. Jumlah usaha baik secara kuantitatif, maupun secara kualitatif
2. Waktu yang tepat dari usaha-usaha tersebut
3. Directing atau penentuan arah usaha-usaha tersebut

Berdasarkan defenisi di atas maka dapat disebutkan bahwa koordinasi memiliki syarat-syarat yakni :

1. *Sense of Cooperation*, perasaan untuk saling bekerja sama, dilihat per bagian.
2. *Rivalry*, dalam organisasi besar, sering diadakan persaingan antar bagian, agar saling berlomba
3. *Team Spirit*, satu sama lain per bagian harus saling menghargai.
4. *Esprit de Corps*, bagian yang saling menghargai akan makin bersemangat.

Selanjutnya koordinasi memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

1. Koordinasi adalah dinamis, bukan statis.
2. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang manajer dalam kerangka mencapai sasaran.
3. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan

kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan.

2.3.1 Tipe-Tipe Koordinasi

Umumnya organisasi memiliki tipe koordinasi yang dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas agar pencapaian tujuan tercapai dengan baik. Tipe koordinasi di bagi menjadi dua bagian besar yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Kedua tipe ini biasanya ada dalam sebuah organisasi. Makna kedua tipe koordinasi ini dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:

- a) Koordinasi Vertikal (*Vertical Coordination*) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.

b) Koordinasi Horizontal (*Horizontal Coordinatiori*) adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatur) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas *interdisciplinary* dan *interrelated*. *Interdisciplinary* adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Sedangkan *Interrelated* adalah koordinasi antar badan (instansi) beserta unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena koordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat. (Hasibuan, 2006:86)

2.3.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Koordinasi

a. Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan

tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

b. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Komunikasi adalah penyampaian informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya dengan menggunakan lambang-lambang, kata-kata, gambar, bilangan, grafik, dan lain-lain. Kegiatan atau proses penyampaian yang biasanya dinamakan komunikasi. (Ruslan, 2003:24)

Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi. (Hasibuan,2006:88).

Dari pengertian komunikasi sebagaimana disebut di atas terlihat bahwa komunikasi itu mengandung arti komunikasi yang bertujuan merubah tingkah laku manusia. Karena sesuai dengan pengertian dari ilmu komunikasi, yaitu suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas azas-azas, dan atas dasar azas-azas tersebut disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap. Maka komunikasi tersebut merupakan suatu hal perubahan suatu sikap dan

pendapat akibat informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain.

Sehingga dari uraian tersebut terlihat fungsi komunikasi sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kejadian dalam suatu lingkungan.
2. Menginterpretasikan terhadap informasi mengenai lingkungan
3. Kegiatan mengkomunikasikan informasi, nilai dan norma sosial dari generasi yang satu ke generasi yang lain. (Hasibuan,2006:90)

Maka dari itu komunikasi itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui informasi atau pendapat atau pesan atau idea yang disampaikannya kepada orang tersebut.

c. Pembagian Kerja

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang berkeja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (*Division Of Labor*). Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi.

Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Jadi pembagian kerja pekerjaan menyebabkan kenaikan efektifitas secara dramatis, karena tidak seorangpun secara fisik mampu melaksanakan keseluruhan aktifitas dalam tugas–tugas yang paling rumit dan tidak seorangpun juga memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai

tugas. Oleh karena itu perlu diadakan pemilahan bagian-bagian tugas dan membagi baginya kepada sejumlah orang. Pembagian pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu.

d. Disiplin

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukan disiplin. Rivai (2005:444) menyatakan pengertian disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan normanorma sosial yang berlaku". Jadi jelasnya bahwa disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku, apakah itu perorangan atau kelompok yang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu organisasi.

Dalam suatu organisasi penerapan peraturan kepada seseorang atau anggota organisasi dikelola oleh pimpinan. Pimpinan diharapkan mampu menerapkan konsep disiplin positif yakni penerapan peraturan melalui kesadaran bawahannya. Sebaliknya bila pimpinan tidak mampu menerapkan konsep disiplin positif pada dirinya sendiri tentu dia juga tidak mungkin mampu menerapkannya pada orang lain termasuk kepada bawahannya. Dengan demikian disiplin itu

sangat penting artinya dalam proses pencapaian tujuan, ini merupakan suatu syarat yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan yang dimaksud.

2.3.3 Tujuan Koordinasi

Koordinasi merupakan kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi, apabila dalam organisasi dilakukan koordinasi secara efektif maka ada beberapa tujuan dan manfaat yang didapatkan.

Adapun tujuan koordinasi dalam organisasi antara lain:

- a. Meraih dan menjaga keefektifitasan seoptimal mungkin dengan sinkronasi, kebersamaa, keselarasan serta keseimbangan antara aktivitas yang saling berhubungan.
- b. Menjalankan pencegahan pada munculnya konflik dan membuat efisiensi yang optimal pada berbagai kegiatan yang interdependen dengan kesepakatan yang mengakomodir semua elemen yang berhubungan.
- c. Koordinasi berupaya untuk menciptakan dan menjaga supaya suasana dan perilaku yang ada saling merespon dan mengantisipasi pada setiap unit kerja baik yang berhubungan atau tidak. Hal ini agar kesuksesan masing-masing unit tidak mengganggu atau diganggu oleh unit lainnya. Untuk itu dibutuhkan koordinasi dengan jaringan komunikasi dan informasi yang efektif.

Koordinasi sangat menentukan terselenggaranya usaha yang telah diprogramkan untuk mencapai hasil yang diharapkan Adapun manfaat koordinasi dalam suatu organisasi, yakni:

- a. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percecokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.
- b. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan perusahaan.
- c. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
- d. Supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu pegawai harus membantu tercapainya tujuan organisasi.
- e. Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan. (Hasibuan, 2006:86)

2.4 Perencanaan Pembangunan

Secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan atau daerah yang bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Literatur ilmiah yang tersedia memberikan beberapa pengertian tentang perencanaan pembangunan dalam bentuk berbagai definisi. Arthur W.Lewis (1965) dalam Sjafrizal mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia lebih produktif. Jensen (1995) merekomendasi bahwa perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya lainnya. (Riyadi, 2002 : 8)

2.4.1 Tujuan dan Fungsi Perencanaan Pembangunan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok, Tujuan dan Fungsi Pokok tersebut sebagai berikut:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar Daerah
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
5. Menjamin Tercapainya Penggunaan Sumberdaya Secara Efisien, Efektif dan Adil.

2.4.2 Jenis Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan mempunyai berbagai jenis, tergantung dari asifatnya masing-masing. Menurut jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat diklasifikasikan atas tiga jenis yaitu :

1. Perencanaan jangka Panjang.

Perencanaan Jangka Panjang biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Pada era orde baru, pembangunan jangka panjang mencakup angka waktu 25 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Garis Garis Besar Haluan Negara. Sedangkan dewasa ini, rencana pembangunan Jangka Panjang, baik nasional maupun daerah mencakup waktu 20 tahun.

2. Perencanaan Jangka Menengah.

Perencanaan Jangka Menengah biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung dari masa jabatan Presiden atau kepala daerah. Di Indonesia, perencanaan jangka menengah mempunyai jangka waktu 5 tahun yang disusun baik oleh pemerintah nasional maupun pemerintah daerah. Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan jabaran dari perencanaan jangka panjang sehingga bersifat lebih operasional. Selain itu, perencanaan jangka menengah memuat juga sasaran dan target pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif supaya besar perencanaan tersebut menjadi lebih terukur dan mudah dijadikan sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi.

3. Perencanaan Jangka Pendek.

Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup 1 tahun, sehingga sering kali dinamakan sebagai rencana tahunan. Rencana ini pada dasarnya adalah merupakan jabaran dari rencana jangka menengah. Disamping itu, perencanaan

tahunan ini bersifat sangat operasional karena didalamnya termasuk program dan kegiatan, lengkap dengan pendanaannya. Bahkan dalam rencana tahunan ini termasuk juga Indikator dan target kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan. Karena itu, rencana tahunan ini selanjutnya dijadikan dasar utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja baik pada tingkat Nasional (RAPBN) maupun pada tingkat Daerah (RAPBD). rencana tahunan yang mencakup kesemua sektor dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sedangkan khusus untuk suatu sektor atau bidang dinamakan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). (Tjokroamidjojo 1976 : 69)

2.4.3 Tahapan Perencanaan Pembangunan

a. Tahap Penyusunan Rencana

Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab badan perencana, baik BAPPENAS untuk tingkat Nasional dan BAPPEDA untuk tingkat Daerah. Bila penyusunan rencana dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perencanaan Partisipatif, maka sebelum naskah rencana disusun, terlebih dahulu perlu dilakukan penjangkaran aspirasi dan keinginan masyarakat tentang visi misi serta arah pembangunan. Berdasarkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat tersebut, maka tim penyusunan rencana sudah dapat mulai menyusun rencana awal (rancangan) dokumen perencanaan pembangunan yang dibutuhkan. Kemudian rancangan tersebut dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk menerima tanggapan baik dari pihak yang peduli dan berkepentingan dengan pembangunan seperti tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, dan para tokoh Lembaga Sosial Masyarakat setempat.

b. Tahap Penetapan Rencana

Sesuai ketentuan berlaku, RPJP perlu mendapat pengesahan dari DPRD setempat, sedangkan RPJM dan RKPD cukup mendapat pengesahan dari kepala daerah. Pada tahap kedua ini kegiatan utama badan perencana adalah melakukan proses untuk mendapatkan pengesahan tersebut.

c. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, perencana masih tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian pelaksanaan rencana bersama SKPD bersangkutan.

d. Tahap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana

Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, badan perencanaan masih mempunyai tanggung jawab terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang *Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, evaluasi harus dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi kinerja yang paling kurang didasarkan atas 3 unsur utama yaitu: unsur masukan (*input*) terutama dana, keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*). Disamping itu, evaluasi ini juga mencakup faktor-faktor utama yang menyebabkan berhasilnya atau kendala yang menyebabkan kurangnya manfaat

yang dapat dihasilkan oleh objek dan kegiatan pembangunan tersebut. (Kuncoro, 2004: 98)

2.5 Study Kasus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bener Meriah 2012-2017

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada dasarnya merupakan jabaran dari perencanaan jangka panjang sehingga bersifat lebih operasional. Selain itu, perencanaan pembangunan jangka menengah memuat juga sasaran dan target pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif supaya perencanaan tersebut menjadi lebih terukur dan mudah dijadikan sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Kabupaten Bener Meriah menghadapi permasalahan dan tantangan baik yang bersifat lokal (daerah) maupun yang bersifat global.

RPJMD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 – 2017 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan dokumen RPJMD ini berpedoman pada RPJMA Provinsi Aceh serta RPJM Nasional. Di samping itu, RPJMD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 – 2017 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor - faktor pendorong, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu, dinamika perubahan yang terjadi secara nasional maupun global, serta isu-isu strategis yang berkembang. RPJMD ini menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang dilaksanakan setiap tahun. Berikut

merupakan permasalahan dan tantangan dalam Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bener Meriah 2012-2017.

2.5.1 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan Masih Rendah

Bener Meriah merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang seharusnya dapat dikelola untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD merupakan salah satu modal untuk menunjang pembangunan di Bener Meriah. Pemanfaatan potensi sumber daya alam juga penting dilakukan untuk membuka lapangan kerja baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam di sektor pertanian dan perkebunan perlu dilakukan secara intensif karena mampu menyerap hampir 50% angkatan kerja. Namun demikian, pengembangan sektor ini dibatasi oleh rendahnya kepemilikan lahan per kepala keluarga. Sektor-sektor lain yang bergerak dalam pemanfaatan potensi sumberdaya kehutanan juga mengalami persoalan yang sama sehingga belum mampu memberikan nilai tambah masyarakat terhadap produk yang dihasilkan. Pemanfaatan sumber daya alam perlu diimbangi dengan upaya mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Penggunaan teknologi harus dilakukan dengan tepat. Sistem pengelolaan hutan, pertambangan dan perkebunan yang belum tepat dapat berdampak pada kerusakan ekosistem, terjadinya bencana alam dan terganggunya tatanan kehidupan sosial masyarakat.

2.5.2 Pelaksanaan Pembangunan Kurang Efektif Dan Efisien

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak tepat sasaran dapat mengakibatkan tidak efisien dan tidak efektifnya pemanfaatan anggaran

pembangunan dan memicu ekonomi biaya tinggi. Selain itu, proses pembangunan juga belum sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat umum. Hal ini mengakibatkan sasaran dan kualitas pembangunan tidak terealisasi secara maksimal. Oleh karena itu, dimasa yang akan datang penetapan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta komitmen yang tinggi dari penyelenggara pemerintahan daerah untuk pencegahan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) sangat diperlukan.

2.5.3 Pelaksanaan Nilai-Nilai Dinul Islam Belum Maksimal

Pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam di Bener Meriah belum maksimal, terutama disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Dinul Islam di kalangan masyarakat. Berbagai perilaku masyarakat masih banyak yang bertentangan dengan moralitas dan etika agama. Pemahaman dan pengamalan agama di kalangan peserta didik (sekolah umum dan agama) juga belum memuaskan disebabkan terutama oleh kuatnya pengaruh negatif globalisasi. Hal tersebut telah mempengaruhi dan mendorong pelaku masyarakat ke arah yang negatif.

Salah satu cara untuk meningkatkan pelaksanaan nilai-nilai Dinul islam ini adalah melalui pendidikan. Pendidikan budi pekerti dan pendidikan karakter dalam bingkai agama dan budaya sangat diperlukan dalam dunia pendidikan saat ini. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai Dinul Islam perlu dilaksanakan sejak usia dini baik di lingkungan pendidikan formal dan informal. Disamping itu, perbaikan kurikulum dan peningkatan kualitas pendidik juga perlu ditingkatkan.

2.5.4 Tingkat Kemiskinan Masih Rendah

Penduduk miskin di Bener Meriah pada tahun 2010 tercatat sebesar 26,22%, jauh lebih besar dari penduduk miskin provinsi Aceh yang sebesar 19,496. Sebaran penduduk miskin Bener Meriah tinggi di tiga kecamatan yaitu Pintu Rime Gayo, Permata dan Bukit. Hal ini mencerminkan bahwa pembangunan selama ini belum memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Pendataan warga miskin secara valid akan sangat membantu dalam pengembangan program pengentasan kemiskinan. Koordinasi antar SKPD untuk pengembangan program pengentasan kemiskinan juga dapat dilakukan dengan lebih baik.

Walaupun tingkat pengangguran terbuka di Bener Meriah pada tahun 2010 relatif rendah (2,25%), program pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan masyarakat yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dasar yang terintegrasi perlu menjadi prioritas di masa yang akan datang. Selain itu, dukungan terhadap akses modal, pemasaran produk unggulan masyarakat dan penguatan kelembagaannya perlu ditingkatkan. Perlu juga dikembangkan partisipasi masyarakat untuk secara aktif turut serta dalam memberdayakan masyarakat miskin.

Salah satu cara lain untuk memutuskan mata rantai kemiskinan struktural adalah melalui pendidikan. Karena itu, upaya penyediaan pendidikan yang murah dan terjangkau untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat yang secara ekonomi kurang beruntung perlu dilakukan secara baik dan terdistribusi merata.

2.5.5 Keterlibatan Peran Swasta Dalam Pembangunan Masih Rendah

Pertumbuhan ekonomi Bener Meriah masih didorong oleh belanja pemerintah. Partisipasi pihak swasta belum menunjukkan pengaruh yang besar terhadap pembangunan. Usaha swasta masih sangat tergantung pada anggaran belanja pemerintah (APBK, APBA dan APBN). Karena itu, pemerintah daerah perlu mengupayakan agar pengusaha lokal, nasional maupun asing untuk berinvestasi di Bener Meriah. Namun demikian, Bener Meriah belum memiliki sistem administrasi dan manajemen investasi yang beroperasi secara optimal. Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait kegiatan investasi belum jelas dan masih tumpang tindih, walaupun Bener Meriah telah memiliki fasilitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi kegiatan penanaman modal. Di samping itu juga belum ada kebijakan investasi dan regulasi mengenai penanaman modal.

Sinkronisasi investasi pembangunan menjadi penting untuk tercapainya sinergi yang optimal antara berbagai pelaku ekonomi melalui pembentukan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat. Kemitraan tersebut ditujukan untuk mensinergikan aktivitas yang dilakukan oleh dunia usaha dengan program pembangunan daerah. Implementasi dari hubungan kemitraan dilaksanakan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai dengan sifat, kondisi, budaya dan kearifan lokal.

2.5.6 Sektor Koperasi Dan UMKM Belum Berkembang Dengan Baik

Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang sangat strategis dalam menunjang perekonomian daerah sekaligus mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun demikian,

sektor ini belum berkembang secara optimal. Permasalahan utama yang selalu dihadapi pelaku UMKM adalah permodalan, pemasaran dan manajemen. Pendekatan yang mungkin dilakukan adalah dengan mempermudah pemberian kredit mikro perbankan dan pemanfaatan CSR BUMN secara tepat sasaran.

Permasalahan lainnya yang masih dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bener Meriah adalah iklim usaha yang kurang kondusif, seperti besarnya biaya transaksi akibat masih adanya ketidak pastian berusaha, persaingan pasar yang kurang sehat, terbatasnya akses kepada sumber daya produktif terutama terhadap bahan baku, permodalan, sarana dan prasarana serta informasi pasar. Di sisi lain, tantangan utama yang dihadapi Usaha UMKM di Bener Meriah adalah masih rendahnya kinerja dan produktivitas usaha dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan internasional. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha UMKM yang berbasis agroindustri yang didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan.

2.5.7 Pertumbuhan Ekonomi Belum Merata

Pertumbuhan ekonomi Bener Meriah masih rendah (1,58% pada tahun 2010), lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Nasional yang tercatat sebesar 6,596 (Bank Indonesia, 2011). Perkembangan pertumbuhan ekonomi Bener Meriah pada periode 2007-2011 juga menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Bener Meriah disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini terlihat dari masih

rendahnya produksi dan nilai tambah dari produk unggulan daerah yang belum secara nyata meningkatkan perekonomian Bener Meriah. Selain itu, masih rendahnya minat investasi swasta pada sektor produktif dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga berkontribusi terhadap rendahnya pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dapat dipacu melalui kebijakan pembangunan pertanian yang dilaksanakan dengan mengembanaan pola pertanian terpadu yang dapat memberikan nilai tambah (added value) tinggi terhadap produk yang dihasilkan. Daya saing produk lokal Bener Meriah juga perlu ditingkatkan di pasar regional dan internasional. Kegiatan promosi perdagangan yang ada selama ini dilakukan belum memiliki target pasar yang jelas sehingga evaluasi juga sulit untuk dilakukan. industri skala kecil dan menengah di Bener Meriah perlu dikembangkan lebih lanjut mencakup investasi, produksi dan pemasaran.

Selain memacu sektor pertanian, perdagangan dan industri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Bener Meriah perlu memberikan perhatian yang lebih serius pada pengembangan sektor Wisata. Sektor ini dapat membuka peluang kerja dan meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Pariwisata yang berbasis alam ekopariwisata di Bener Meriah memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Hal-hal yang harus dilakukan untuk pengembangan pariwisata di Bener Meriah adalah infrastruktur pariwisata (akomodasi, transportasi dan jasa pelayanan), promosi pariwisata, kebersihan di kawasan wisata dan sekitarnya, keamanan dan ketertiban yang menjamin kenyamanan wisatawan, dan diversifikasi atraksi pariwisata alami

2.5.8 Kualitas Sumber Daya Manusia Masih Rendah

Kualitas sumberdaya manusia (SDM) Bener Meriah yang direpresentasikan indikator indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih tergolong rendah. Daya saing SDM Bener Meriah juga masih tergolong rendah, yang dicirikan dengan masih terbatasnya jumlah lulusan sekolah kejuruan yang memiliki keterampilan (*skill*), jumlah tenaga kerja yang berpendidikan tinggi masih sedikit dan rasio ketergantungan penduduk usia produktif dengan jumlah penduduk masih tinggi. Angka rasio ketergantungan hidup pada tahun 2009 adalah 55,59%. ini berarti setiap satu orang penduduk usia produktif harus menanggung seorang penduduk usia tidak produktif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini harus dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Pendidikan keterampilan bagi masyarakat Bener Meriah juga perlu ditingkatkan, khususnya bagi warga miskin. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat mengembangkan diri dan dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, permasalahan kesehatan di Bener Meriah yang perlu diatasi diantaranya untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil, kesehatan balita, serta PHBS dan kesehatan lingkungan

2.5.9 Infrastruktur Dan Tata Ruang Belum Optimal

1. Laju Perubahan Penggunaan Lahan

Pemasalahan laju perubahan penggunaan lahan yang khususnya terjadi akibat konversi hutan produksi menjadi kebun dan ladang relatif tinggi. Laju perubahan penanaman lahan baru ini menjadi perhatian serius agar fungsi hutan, sebagai hutan lindung dan hutan produksi dapat dipertahankan.

2. Infrastruktur Pedesaan

Infrastruktur pedesaan yang masih menjadi permasalahan di Bener Meriah adalah akses transportasi dan bangunan rumah layak huni. Aksesibilitas menjadi penting dalam pembangunan daerah karena aksesibilitas yang baik akan menjamin mobilitas penduduk barang dan jasa menjadi semakin lancar. Selain itu perlu dikembangkan pusat-pusat pelayanan baru sehingga dapat mendorong peningkatan sektor perekonomian.

2.6 Landasan Hukum

Beberapa peraturan dan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bener Meriah 2012-2017 adalah sebagai berikut:

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 12. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 13. Undang-Undang No. 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
 14. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran;
 15. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah;

18. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
28. Pergub Nomor 70 Tahun 2013 tentang RPJM Aceh 2012 – 2017.
29. Qanun Bener Meriah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bener Meriah tahun 2012 - 2032;
30. Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 415/488/SK/2012 Tentang Pembentukan tim rancangan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Bener Meriah tahun 2012 – 2017;

2.7 Kerangka Pemikiran

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam melaksanakan fungsinya, terlebih dahulu melaksanakan berbagai proses perumusan kebijakan yang nantinya menjadi acuan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah baik di tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, sampai di tingkat kabupaten.

Peranan BAPPEDA dalam pembangunan daerah dapat dilihat melalui proses perencanaan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, proses perumusan kebijakan ini dimulai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, forum SKPK dan Forum Gabungan SKPK sampai pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kabupaten.

Faktor pendukung dalam proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tersebut adalah adanya suatu koordinasi yang dilakukan antar berbagai pihak, partisipasi masyarakat yang masih tergolong tinggi serta adanya komitmen dari pihak pemerintah dalam pencapaian proses pembangunan daerah. Selain faktor pendukung, terdapat pula faktor penghambat dalam proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan antara lain penyesuaian atau kesiapan penetapan anggaran, munculnya usulan dari masyarakat yang terlalu banyak serta adanya keterbatasan dalam pengadaan dokumen penunjang.

Semua proses yang dilakukan dalam hal perumusan kebijakan mulai dari pelaksanaan Musrenbang tingkat desa/kelurahan sampai pada tingkat kabupaten tersebut adalah bermuara pada upaya tercapainya pembangunan daerah di Kabupaten Bener Meriah secara maksimal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dimana sugiyono (2014 : 12) mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Dalam jenis penelitian ini makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

3.1.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dalam artian tidak bertujuan untuk menguji hipotesa penelitian tetapi memberikan gambaran bagaimana tugas dan fungsi bappeda terhadap pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017. Penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017

3.1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bener Meriah. Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh.

Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2004. Sejak pemekaran, Kabupaten ini masih berfokus pada pembangunan daerah, sehingga program-program kerja pembangunan daerah masih berpusat pada infrastruktur daerah. Selain itu, tahun 2017 BAPPEDA kabupaten Bener Meriah meraih anugrah Perencanaan pembangunan daerah untuk pertama kalinya sejak 2004. Ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan tersendiri untuk BAPPEDA khususnya dan Kabupaten Bener Meriah pada umumnya.

3.1.4 Waktu Penelitian

Berikut merupakan rencana waktu penelitian pada penelitian ini.

No	Uraian Kegiatan	Februari 2018		Maret 2018				April 2018				Mei 2018				Juni 2018				Juli 2018				Agustus 2018			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan proposal																										
2	Seminar proposal																										
3	Perbaikan proposal																										
4	Penelitian																										
5	Penyusunan skripsi																										
6	Seminar hasil																										
7	Perbaikan skripsi																										
8	Sidang meja hijau																										

3.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami permasalahan yang akan diteliti.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling* yaitu teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah :

1. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bappeda Kabupaten Bener Meriah
2. Informan utama dalam penelitian ini adalah SKPK Kabupaten Bener Meriah
3. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah Tokoh Masyarakat.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara

jawaban informan dengan kenyataan yang ada, dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

b) Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.

c) Dokumentasi

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh lembaga/perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa hasil rapat, laporan pertanggungjawaban, surat, dan catatan harian.

d) Study kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting sekali dalam metode ilmiah untuk mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian dan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai ke mana terdapat kesimpulan dan degeneralisasi yang pernah dibuat. Cara yang dilakukan dengan mencari data-data pendukung (data sekunder) pada berbagai literatur baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen,

makalah-makalah hasil penelitian serta bahan-bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3.4 Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Sedangkan teknik analisis data Moelong (2006:239) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola kategorisasi dan satuan uraian dasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, maka teknis analisis datanya disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan lapangan baik berupa data dan informasi hasil wawancara, dokumentasi dan lain sebagainya. Teknik analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Setelah peneliti memperoleh data, harus lebih dahulu dikaji kelayakannya dengan memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai usaha menampilkan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian tersebut akan dapat dipahami apa yang

terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis atautkah mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

3. Kesimpulan

Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung, makna-makna yang muncul dari data yang ada diuji kebenaran, kekokohan, dan kecocokannya, sehingga akan diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaanya



DAFTAR PUSTAKA

- Handoko, T. Hani 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Pertama*.
Graha Ilmu : Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu S.P 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah. Edisi Revisi*. Bumi Aksara : Jakarta
- Kadir, Abdul. *Studi Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik*. CV. Dharma Persada Dharmasraya : Medan
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi Dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi Dan Peluang*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Riyadi, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah (strategi menggali potensi dalam mewujudkan otonomi daerah)*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Sugiharto.2010. *Pembangunan dan Pengembangan Wilayah*. USU Press : Medan
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta : Bandung
- Syaodih, Ernady. *Manajemen Pembangunan : Kabupaten dan Kota*. Reflika Aditama : Bandung
- Tjokroamidjojo, Biontoro.1976. *Perencanaan Pembangunan*.CV. Haji Masaagung : Jakarta.

Undang-Undang

Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980, Tentang Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Keputusan Presiden Republik Indonesia No 41 Tahun 2007 tentang organisasi
Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah

Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener
Meriah

Dokumen

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2014-2017

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bener Meriah
Tahun 2012 – 2017

Lampiran

DAFTAR PERTANYAAN

Tanya :

Mengapa program lingkungan sehat pemukiman tidak terealisasi?

Jawab :

Tanya :

Apakah ada koordinasi dengan SKPK terkait dengan tidak terealisasinya lingkungan sehat perumahan?

Jawab :

Tanya :

Apakah tahapan yang dilakukan jika ditemukan hal pergantian program kerja seperti pada kasus ini?

Jawab :

Tanya :

Apakah kendala yang dihadapi saat berkoordinasi dengan SKPK terkait.?

Jawab :

Tanya :

Kegiatan apa yang dilakukan untuk menelan angka efektifitas pelayanan kepada masyarakat?

Jawab :

Tanya :

Kendala apa yang terjadi saat pelaksanaan?

Jawab :

Tanya :

Bagaimana tanggapan anda tentang keterbukaan informasi yang anda terima?

Jawab :

DOKUMENTASI

Foto bersama bapak Khairun Aksa, SE, MM kepala BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah



Foto bersama bapak Fahmi, ST kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bener Meriah



Foto bersama Bapak Iwan Lukman Nulhakim kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bener Meriah

